

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang memiliki potensi sumber daya alam terbesar didunia. Potensi ini sampai sekarang lebih banyak oleh masyarakat pedesaan. Pada masa ordebaru, pedesaan menjadi basis utama pertumbuhan ekonomi Negara. Meskipun sampai saat ini masyarakat pedesaan masih berada pada tingkat kemiskinan yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian secara langsung dari pemerintah, sehingga langkah-langkah pemerintah Era reformasi ditindak lanjuti melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) pedesaan. Program ini berangkat dari sebuah kerangka pemahaman bahwa melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek upaya penanggulangan kemiskinan (TP PNPM Mandiri, 2009:3).

Masyarakat pedesaan secara mandiri mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada diwilayahnya, dengan memanfaatkan dana bantuan PNPM Pedesaa. Salah satu bagian dari program yang dikembangkan ialah adanya simpan pinjam kelompok perempuan atau SPKP. Sasaran utama dari program SPKP adalah pemberdayaan perempuan dalam hal ini ibu rumah tangga pedesaan yang umumnya lebih banyak mengelola urusan rumah tangga dibandingkan membantu peningkatan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Sebenarnya banyak fakta menunjukkan bahwa dalam pembangunan, perempuan, perempuan seringkali menjadi pihak tertinggal. Padahal terdapat dua indikator keberhasilan pembangunan. Pertama akses dan kontrol akan pembangunan bias dilakukan atau didapatkan perempuan dan laki-laki secara adil, proporsional, dan berkelanjutan, baik diarela public atau domestic.

Keberdayaan perempuan dibidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja diluar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat. Lebih dari seabad lalu dikemukakan Kartini, bahwa tiap perempuan meski memiliki kemandirian secara ekonomi, agar dirinya punya kuasa dan posisi dalam hubungan domestic, keluarga, dan lingkungan social.

Program SPKP merupakan sebuah program pengelolaan dana PNPM pedesaan yang disalurkan secara langsung kepada kelompok-kelompok perempuan dalam rumah tangga. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk program pemberdayaan perempuan dalam kegiatan kursus, pelatihan, usaha mikro dan terutama kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

Adanya program pemerintah melalui SPKP, memberikan peluang kepada perempuan untuk mampu meningkatkan berbagai keterampilan yang dimilikinya, guna menstimulasi perubahan ekonomi dalam rumah tangga. Pemerintah

menjadikan program ini sebagai salah satu ujung tombak terhadap perbaikan keterampilan perempuan. Dalam pengelolaanya dibutuhkan anggaran dan pengelola yang mampu bersinergi dengan baik.

Pengelolaan SPKP di desa Bendungan Kabupaten Bone Bolango menghadapi masalah seperti adanya kecenderungan memanfaatkan dana pinjaman sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif. Peminjam dari empat kelompok sebagian besar tidak memiliki keterampilan yang memadai. Rata-rata anggota kelompok hanya bias membuat usaha kecil seperti kue basah dan kue kering. Prospek usaha ini memang sangat tidak memungkinkan, karena hanya saat lebaran atau adanya pesanan para anggota baru dapat melakukan usaha. Tidak ada usaha lain yang dilakukan untuk memanfaatkan dana pinjaman SPKP.

Masalah konsumtif disadari sebagai tantangan terbesar pengelola SPKP desa bendungan Kabupaten bone Bolango. Karenanya diperlukan strategi tertentu sebagai pelatihan membuat kerajinan tangan, pelatihan kursus menjahit, pelatihan kursus keterampilan lain yang sesuai dengan bakat para anggota. Idealnya penerapan strategi terhadap ancaman daya konsumtif dikalangan anggota perlu dilakukan, guna meningkatkan kesadaran diri para anggota tentang hakikat penggunaan dana pinjaman SPKP.

Mengurangi ancaman daya konsumtif dapat dilakukan dengan pengelolaan atau manajemen yang baik. Dalam hal ini, peran pengelola semestinya mampu menempatkan dana SPKP sebagai program yang bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Pengelola dapat saja mengobservasi terlebih dahulu kepentingan anggota yang akan diberikan dana bantuan. Setelah itu, dapat ditindak lanjuti dengan

mekanisme perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dengan melaksanakan kelima aspek pengelolaan ini dapat dipastikan bahwa program SPKP dapat dikelola dengan baik.

Kelima aspek pengelolaan diatas, yang paling urgen atau sangat penting untuk dilaksanakan ialah monitoring atau evaluasi. Melalui monitoring, pengelola secara bertahap melakukan pemantauan jenis usaha anggota yang dibantu dengan anggaran SPKP. Setelah itu, pengelola dapat memberikan evaluasi atas hal-hal yang dianggap sudah baik, hal-hal yang masih dianggap kurang, dan memberikan catatan-catatan berupa solusi pengembangan usaha anggota benar-benar menggunakan anggaran seperti pemenuhan kebutuhan usaha, bukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Selama ini, pengelola SPKP Desa Bandungan tidak terlalu memperhatikan prinsip pengelolaan. Pengelola hanya mengandalkan petunjuk operasional dan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh PNPM pusat, tanpa memaksimalkan fungsi-fungsi pengelolaan sesuai dengan potensi ekonomi social yang ada didesa Bandungan. Hal ini tidak sepenuhnya dipandang keliru, namun demikian dalam mensukseskan program SPKP semestinya petunjuk tersebut dijabarkan secara mandiri melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Berangkat dari gambaran diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang hal-hal unik tentang pengelolaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) desa Bandungan Kabupaten Bone Bolango melalui suatu penelitian dengan judul “Deskripsi

Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Bandung Kabupaten Bone Bolango”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan SPKP didesa Bandung Kabupaten Bone Bolango menghadapi masalah seperti adanya kecenderungan memanfaatkan dana pinjaman sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif.
2. Selama ini, pengelola SPKP Desa Bandung tidak terlalu memperhatikan prinsip pengelolaan.
3. Pengelola hanya mengandalkan petunjuk operasional dan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh PNPM pusat, tanpa memaksimalkan fungsi-fungsi pengelolaan sesuai dengan potensi ekonomi social yang ada didesa Bandung

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka masalah pokok penelitian yaitu “Bagaimanakah Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Bandung Kabupaten Bone Bolango ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

(SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Bandungan Kabupaten Bone Bolango.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangsih yang begitu besar dalam mendeskripsikan Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Bandungan Kabupaten Bone Bolango. Di samping itu, digunakan sebagai sumber informasi, khasanah wacana kepustakaan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Bandungan Kabupaten Bone Bolango

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pengelola SPKP**

Memberikan rangsangan kepada pengelola SPKP untuk lebih memperhatikan maksimalisasi pengelolaan SPKP sehingga dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Menjadi informasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) mampu memberikan bantuan modal dalam usaha peningkatan usaha ekonomi pedesaan utamanya kaum perempuan.